



KEMISKINAN, PEREMPUAN DAN AGAMA

Taufik
Pascasarjana UIN Yogyakarta
Taufik_akbar@g.mail.com

Abstrak

Kemiskinan telah menjadi persoalan serius yang dihadapi masyarakat kontemporer. Problem ini seringkali menempatkan kaum perempuan pada posisi yang tidak menguntungkan. Pada satu sisi, perempuan dituntut untuk berperan di semua sektor, namun di lain sisi muncul tuntutan agar perempuan tidak melupakan "kodratnya" sebagai perempuan. Artikel ini mencoba mengulas peran agama dalam mengentaskan kemiskinan dan ketertindasan perempuan. Mengingat agama memiliki seperangkat nilai dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menggerakkan spirit perubahan sekaligus pemberdayaan bagi kaum perempuan.

Abstract

Poverty has become a serious problem faced by contemporary society. The problem often puts women at a disadvantage. On the one hand, women are required to participate in all sectors, but on the other hand, women are expected not forget their "nature" as a female. This article tries to review the role of religion in alleviating poverty and oppression of women. Religion has a set of values that can be used as a guide to generate the spirit of changes and to empower women at once.

Kata Kunci: *Kemiskinan, Perempuan, Agama, Keadilan.*

A. Pendahuluan

Sebagian kalangan menilai, bahwa agama hanya menjadi kekuatan moral dan menjadi alat legitimasi bagi kaum *mustad'afin* yang tidak mampu bangkit dari ketertindasannya. Persoalan kemiskinan, ketimpangan sosial-budaya, marginalisasi

dan eksploitasi dianggap hal yang *given*. Hal ini bersandar pada rasionalisasi bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang terjadi di dunia ini telah menjadi takdir Tuhan yang ditentukan sejak zaman azali. Itulah kemudian, dalam teologi Islam dikenal dengan teologi *As'ariyah-jabariyah*.

Meminjam istilah Moh. Abduh bahwa penggunaan teologi jabariyah di atas membuat umat Islam menjadi stagnan dan tidak progresif, di mana akal dan kedaulatan manusia diletakkan dibawah teks dan kehendak Tuhan. Padahal, jika umat Islam mau mempelajari perjuangan Rasulullah, nampak adanya upaya pembebasan budak dari belenggu pemiliknya, kelas penguasa dan pemilik modal.¹

Ajaran tauhid dalam konsepsi Nabi Muhammad terkait erat dengan perubahan sosial dari tatanan yang eksploitatif menuju tatanan yang berkeadilan. Namun, nampaknya kegagalan serta kekakuan dalam mengkontekstualisasikan teks membuat agama kehilangan substansinya dari semangat perubahan sosial.

Selama ini, elit keagamaan hanya sibuk dengan persolalan ritual-transendental semata, demi mencapai surganya Tuhan. Nampaknya, tidak ada lagi kesempatan masuk surga bagi kaum masakin, bodoh dan orang terbelakang, sebab kemiskinan yang menderanya membuatnya lalai menjalankan perintah-Nya. Padahal, Robert N Bellah mengatakan bahwa agama adalah cara untuk memahami dunia, akan tetapi realitas yang terjadi justru elit agama lebih asyik berkencan dengan Tuhan. Sehingga marginalisi, eksploitasi kemanusiaan oleh kelas dominasi tidak lagi dimaknai sebagai pengingkaran dari pesan-pesan agama.

Mestinya, marginalisasi dan penindasan bagi kaum *mustad'afin* dijadikan prioritas bagi elit keagamaan untuk melakukan perubahan dengan semangat iman dalam bentuk amal. Hal ini sesuai dengan anjuran Tuhan untuk selalu berlomba-lomba dalam kebajikan. Keshalehan personal terhadap Tuhan tidak akan mampu membendung arus penindasan dan marginalisasi oleh kelas dominasi terhadap kaum *mustad'afin*. Sejatinnya, keshalehan ini diwujudkan dalam interaksi dan sistem sosial dalam kehidupan sehari-hari.

¹ Harun Nasution, *Theologi Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), h. 17.

Jika agama tidak menjadi sumber perubahan, maka agama hanya menjadi sesuatu yang formal tanpa memiliki makna yang signifikan dalam kehidupan manusia, bahkan lebih tragis, secara lambat laun agama akan ditinggalkan oleh penganutnya.

Agama lahir bukan di ruang hampa, kelahiran agama sebagai respon dari realitas sosial yang menindas. Maka paradoks, ketika orang yang mengaku taat beragama justru mengingkari pesan agama. Secara historis agama hadir untuk memerangi ketidakadilan yang dilakukan oleh kelas penguasa. Seperti halnya agama yang dibawa Musa as, ini tidak lain semata-mata untuk menggugat dan memerangi ketidakadilan dan penindasan yang dilakukan Fir'aun terhadap rakyatnya.

Begitu juga dengan Islam, kiranya "*rahmatan li al-alamin*" tidak akan berarti ketika tidak mampu memecahkan persoalan kemanusiaan. Inipun menjadi ahistoris dari kelahirannya, karena agama yang dibawa Nabi Muhammad hadir di tengah-tengah realitas sosial yang timpang dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Maka, keterlibatan agama dalam ranah sosial-politik menjadi mutlak adanya.

Frank Whaling ketika berusaha mendefinisikan agama, menyatakan bahwa sebuah komunitas iman, bisa disebut sebagai agama manakala memiliki delapan unsur pokok di dalamnya. Salah satu unsur pokok itu adalah keterlibatan dalam kehidupan sosial dan politik (*involvement in social and political contexts*). Maka, tak dapat dipungkiri bahwa semua agama yang ada di dunia mempunyai keterlibatan sosial dan politik, di mana perubahan menjadi inspirasi bagi setiap agama. Bahkan Whaling menilai Islam adalah agama yang mempunyai keterlibatan yang cukup tinggi. Penilaian ini tidak hanya datang dikalangan Non Islam, bahkan Farid Esack pemikir Islam Liberal berkebangsaan Afrika Selatan pun meyakini hal itu.

Penelitian Syaiful Mujani menjadi analisa kritis terhadap substansi iman, karena kualitas iman yang diderivasikan ke dalam keshalehan ritual, seperti menjalankan perintah agama (sholat, puasa, haji, zakat) tidak serta merta mengindikasikan keshalehan sosial. Justru, sebaliknya banyak dari responden yang shaleh secara ritual malah mengartikulasikan sikap yang bertolak belakang dari implikasi sosial yang semestinya diharapkan.

Iman dan amal menjadi mata rantai yang harus sinergis, oleh karena itu keduanya tampil menjadi mainstream dalam sebuah perubahan sosial. Akan sulit kiranya, sebuah perubahan jika iman hanya disandarkan pada keshalehan vertikal (*mahgdah*) tanpa dibarengi dengan keshalehan sosial (amal shaleh) yang lebih memihak kepada persoalan kemanusiaan. Inti dari iman tidak cukup percaya kepada Tuhan, namun iman bisa berfungsi untuk memerangi ketidakadilan dan pembebasan manusia.²

Teologi Pembebasan ala Ali Asghar Engineer dan Gustavo Guterrez, Teologi Kiri ala Munir Mul Khan serta *Weapons the Weaknya* (senjata kaum lemah) James C. Scott, dapat menjadi alat bantu untuk melakukan aksi-aksi kemanusiaan yang dapat meminjam istilah Farid Esack- membebaskan yang tertindas.

Sementara Moeslim Abdurrahman melontarkan ide cemerlangnya mengenai “Teologi Islam transformatif”. Di mana Islam transformatif adalah Islam yang membuat distingsi dengan proses modernisasi atau modernitas, karena di dalam proses modernisasi itu banyak orang yang semakin tidak peduli terhadap persoalan perubahan atau proses sosial yang semakin memarginalkan orang-orang yang tidak punya akses dengan pembangunan (baca: Agama sebagai kritik sosial).

Penindasan dan pemarginalan terhadap kaum duafa’ dan masakin sering dilakukan oleh kelas-kelas dominan. Pun, elit keagamaan menjadi bagian dari proses dehumanisasi. Bersandar pada realitas seperti itu, maka menghadirkan agama sebagai *rahmatan lial-alamin* bagi seluruh umatnya menjadi sebuah keharusan untuk menghadang dan membendung kemungkaran sosial.

Dalam kondisi yang demikian, term kemiskinan, perempuan dan agama merupakan kosa kata yang sering memenuhi pemberitaan media di era globalisasi ini. Memang sulit dipungkiri, antara perempuan, kemiskinan dan agama bagaikan suatu lingkaran yang saling terkait satu sama lain. Hubungan dialektis antara ketiganya telah melahirkan hubungan yang memilukan. Kalau kita menghubungkan antara kemiskinan dan agama, maka yang menjadi obyek adalah perempuan. Dan, di antara kemiskinan

² Zakiyuddin Baidawi, *Islam Melawan Kapitalisme*, (Yogyakarta: Resist Book, 2007), h. 27.

dan perempuan sangat jelas bahwa korban yang paling menderita adalah perempuan. Sementara pertemuan antara perempuan dan agama selalu menimbulkan kegetiran karena agama memandang perempuan sebagai makhluk setengah laki-laki. Minimal ada justifikasi agama untuk menjadikan perempuan sebagai korban kemiskinan. Apakah betul demikian? Semoga paparan di bawah ini memberikan kejelasan bagi hubungan segitiga yang memilukan tadi.

Kemiskinan merupakan dampak yang paling nyata akibat globalisasi di bidang ekonomi. Dari perspektif ekonomi, globalisasi memaparkan angka-angka yang memilukan. Laporan Pembangunan Manusia (HDR) PBB tahun 1999 menyebutkan 840 juta orang kekurangan gizi, termasuk di dalamnya satu dari empat anak di dunia. Sementara, di pihak lain terjadi pemusatan ekonomi di tangan segelintir orang. Bagaimana mungkin tiga orang terkaya di dunia berpendapatan lebih besar dari pendapatan 48 negara miskin. Kekayaan bersih 200 orang terkaya di dunia meningkat dari 440 milyar dolar AS pada 1994 menjadi 1 trilyun dolar AS pada 1998. Padahal, jika empat persen saja dari harta mereka disumbangkan akan dapat mengurangi kemiskinan yang sangat parah di seluruh dunia.³

Mengapa perempuan? Karena statistik dunia menunjukkan bahwa kelompok yang paling rentan mengalami penindasan, diskriminasi dan kekerasan akibat kemiskinan adalah perempuan. Lihat saja kasus-kasus yang berhubungan dengan buruh migran, trafficking, prostitusi, dan kekerasan di wilayah konflik. Dalam bidang ekonomi, kaum perempuan yang jumlahnya lebih 50% dari total populasi penduduk dunia ternyata hanya memiliki seperseribu dari jumlah kekayaan dunia, dan hanya menerima 10% dari total gaji dunia.

Lalu apa hubungannya dengan agama? Agama sejatinya merupakan pedoman hidup bagi manusia agar mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan dalam menjalani kehidupan di dunia menuju kehidupan yang lebih abadi di akhirat nanti. Semua agama mengajarkan bahwa kemiskinan itu adalah musuh

³ Abdullah Zaki al-Kaaf, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 98.

yang harus dilenyapkan karena kemiskinan dapat menjebak manusia kepada perilaku yang tercela dan hina, bahkan dalam Islam dipahami kemiskinan dapat mengantarkan manusia ke jurang kekafiran. Karena itu, kemiskinan musuh semua agama dan harus dilenyapkan agar manusia menikmati kesejahteraan dan kebahagiaan. Akan tetapi, dalam realitas sehari-hari, agama seringkali justru digunakan sebagai pembenaran dari berbagai upaya pemiskinan, khususnya pemiskinan terhadap perempuan.

B. Faktor Penyumbang Kemiskinan

Indikator yang digunakan untuk menghitung tingkat kemiskinan adalah dengan menggunakan jumlah dan persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan yang dihitung berdasarkan rata-rata pengeluaran makanan dan makanan per kapita kelompok yang telah ditetapkan. Dalam hal ini BPS menggunakan beberapa variabel untuk mendefinisikan rumah tangga miskin yaitu antara lain: 1) ciri tempat tinggal meliputi luas lantai, jenis lantai, ketersediaan air bersih dan jenis jamban, 2) kepemilikan aset meliputi aset produktif seperti sawah, kebun, ternak, angkutan dan sebagainya serta aset non produktif seperti TV, radio, perhiasan, mebel, sepeda, dan kendaraan bermotor yang bukan untuk diusahakan, 3) aspek pangan meliputi variasi konsumsi lauk pauk, 4) aspek sandang meliputi daya beli pakaian per tahun serta 5) kegiatan sosial yang diikuti.

Ada pandangan stereotipe di masyarakat bahwa kemiskinan itu akibat malas dan tidak hemat. Padahal, sejumlah penelitian mengungkapkan bahwa kemiskinan disebabkan oleh sejumlah faktor yang jalin berkelindan, seperti model pembangunan yang dianut negara, ketidakadilan yang mengendap dalam sistem struktur dan kebijakan-kebijakan sosio-ekonomi-politik yang tidak berpihak, pandangan teologis yang tidak kondusif, dan lainnya.

Dalam konteks yang demikian, perempuan dihadapkan pada kenyataan yang serba memilukan. Pada satu sisi, perempuan dituntut untuk berperan di semua sektor, namun di lain sisi muncul tuntutan agar perempuan tidak melupakan “kodratnya” sebagai perempuan. Tuntutan demikian membuat perempuan memikul beban yang berat (*double burden*). Peran ganda bukan hal baru. Sejak kecil mereka terdidik untuk mampu bertahan hidup

dan menghidupi keluarganya dengan bekerja. Pembangunan (industrialisasi) memiskinkan mereka, mesin dan tenaga kerja terampil menyingkirkan tenaga mereka dari pekerjaan.

Sayangnya dalam masyarakat istilah kodrat mengalami distorsi makna. Hal-hal yang sejatinya merupakan konstruksi sosial budaya masyarakat dianggap sebagai kodrat, misalnya keharusan perempuan bekerja di ranah domestik atau bekerja dalam lingkup pekerjaan rumah tangga. Celaknya, pandangan bias gender tersebut oleh pemerintah dilembagakan dalam program pembangunan. Di sana disebutkan lima tugas utama perempuan (Panca Tugas Perempuan), yakni: (1) sebagai pendamping suami, (2) sebagai pendidik generasi muda, (3) sebagai pengatur rumah tangga, (4) sebagai tenaga kerja, dan (5) sebagai anggota organisasi masyarakat.

Persoalan lain adalah hampir sebagian besar perempuan masih kurang memiliki keterampilan. Lagi pula mereka dibatasi oleh nilai-nilai kultural mengenai jenis pekerjaan yang boleh digeluti. Berbeda dengan kaum laki-laki yang bebas memperoleh pekerjaan dan pendidikan untuk menunjang pekerjaannya. Padahal, perempuan -khususnya perempuan pedesaan yang miskin- merupakan tenaga kerja utama, sama dengan laki-laki dalam keluarga mereka. Pada kenyataannya, perempuan selalu diposisikan sebagai pencari nafkah tambahan. Dengan demikian, sangat jelas bahwa kemiskinan adalah salah satu penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan, baik di rumah tangga maupun di luar rumah tangga.

Oleh karena itu, upaya untuk mengentaskan kemiskinan harus dilakukan dari berbagai aspek secara serentak. Salah satunya melalui aspek pendidikan. Pendidikan masih dipercaya sebagai upaya mobilitas sosial dalam mencapai kehidupan yang lebih baik. Selain pendidikan, kelompok pers juga memiliki peranan besar dalam memobilisasi masyarakat untuk mendukung gerakan nasional memberantas kemiskinan. Perlu pendekatan multi-disiplin dalam melihat kemiskinan sehingga pemerintah dapat terbantu mencari solusi yang tepat dalam mengatasi persoalan itu. Industrialisasi ternyata tidak memberi solusi bagi kemiskinan. Justru yang paling banyak menyerap tenaga kerja dan pengangguran

adalah sektor self employed (membuka kesempatan kerja untuk diri sendiri).

Upaya lainnya adalah memberikan peluang bagi mereka untuk usaha ekonomi dalam skala modal kecil dan berkeuntungan kecil. Sebab, ternyata usaha itulah yang bisa tetap bertahan di masa krisis moneter ini. Masalahnya, budaya masyarakat yang patriarkhis telah menciptakan cara berpikir dikotomis, yaitu dua hal berbeda yang dinilai dan dipertentangkan. Dalam kehidupan ekonomi dikenal pekerjaan publik dan pekerjaan domestik. Pekerjaan publik diberi arti pekerjaan di luar rumah, diberi nilai ekonomi dan disebut penghasilan. Sedangkan pekerjaan domestik, pekerjaan dalam rumah atau keluarga, tidak diberi nilai ekonomi. Jadi walaupun menghasilkan benda atau jasa untuk kebutuhan hidup tetap tidak ada nilai ekonominya, bahkan diakui sebagai pekerja produksi pun tidak. Akibatnya, kaum perempuan yang diberi bagian bekerja di sektor domestik dianggap tidak melakukan pekerjaan produktif. Kaum perempuan makin tersingkir dari fungsi ekonomi ketika masyarakat membagi tugas berdasarkan jenis kelamin. Padahal dalam realitas justru kaum perempuan dari masyarakat tingkat bawah yang gigih bekerja untuk menyanggah hidup.⁴

C. Buruh Migran: Jalan Pintas Perempuan Keluar dari Zona Kemiskinan

Data tahun 2003 menyebut jumlah penduduk miskin Indonesia sebesar 37,3 juta jiwa atau 17,42 % dari total penduduk yang mencapai 214,37 juta jiwa, dengan tingkat kepadatan 133 jiwa per km² (sensus Februari 2003). Dilihat dari persentase penduduk miskin berdasarkan Head Ount Index, penduduk miskin di pedesaan (20,23 %) lebih besar dibandingkan di perkotaan (13,57%). Saya yakin data tersebut seperti gambaran gunung es, artinya jumlah penduduk miskin yang sesungguhnya jauh lebih banyak dari yang resmi dilaporkan. Kemiskinan erat kaitannya dengan pendapatan suatu keluarga untuk mencukupi kebutuhan dasar hidupnya. Pendapatan tersebut diperoleh melalui kerja, baik di sektor formal maupun informal. Pada kenyataannya, angka pengangguran di Indonesia masih menunjukkan angka yang memprihatinkan. Data

⁴ Muh. Baqir Al-Shadr, *Iqtishaduna*, (Jakarta: Zahra, tt), h. 299.

BPS tahun 2003 menyatakan 60,43% dari penduduk Indonesia adalah angkatan kerja dan sebanyak 16 persennya adalah pengangguran.

Meski persentase penduduk yang bekerja penuh lebih besar di perkotaan, namun untuk sektor utama lapangan kerja lebih dominan di pedesaan. Sayangnya, kesempatan kerja di pedesaan semakin bekurang dengan masuknya teknologi pertanian maupun non pertanian yang menggeser peran yang dulu dikerjakan oleh tenaga manusia yang umumnya perempuan. Sektor pertanian lebih banyak dikerjakan perempuan daripada laki-laki (69,32% berbanding 68,03%). Oleh karena itu, perempuan yang telah didomestikasi oleh budaya, semakin terpinggirkan oleh perkembangan teknologi tersebut. Ironisnya banyak perempuan yang memikul beban hidup anggota keluarganya, bahkan perempuan sebagai kepala rumah tangga mencapai angka 12,73% pada 2001.

Masuknya mesin-mesin pengolahan pertanian berdampak pada berkurangnya pendapatan buruh tani di pedesaan dan pada gilirannya memaksa mereka mencari tambahan pendapatan di luar pertanian. Sejumlah penelitian menyimpulkan bahwa keadaan sosial merupakan faktor utama yang menyebabkan seseorang berpindah lokasi (Tjiptoherijanti, 1982:50). Tiadanya mata pencaharian, khususnya di bidang pertanian menekan penduduk pedesaan melakukan migrasi ke kota. Penelitian Bappenas juga menyatakan hal yang sama (Kuntjoro-Jakti, 1986: 72-91). Penelitian terhadap 3.197 migran yang dipilih secara acak di Jakarta mengungkapkan bahwa 80% dari mereka mengatakan belum pernah pergi ke Jakarta sebelumnya. Para migran awalnya datang ke Jakarta dengan perkiraan akan tinggal sebentar saja. Namun, kemudian mereka memutuskan untuk menetap dengan alasan tidak mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan, sementara di desa tidak demikian. Sebagian besar mereka adalah tidak berpendidikan, tidak memiliki keterampilan karena itu mereka lebih banyak terserap di sektor informal yang berpenghasilan sangat rendah. Dari sampel 560 orang pedagang, 10% dari mereka belum mempunyai gerobak dorong untuk menjajakan dagangannya. Dari keseluruhan sampel (3.197 orang), hanya 30% yang memiliki radio transistor. Hanya sedikit yang bertempat tinggal di lokasi yang memiliki sarana seperti listrik, air bersih dan jamban. Walaupun kehidupan begitu

susah, para migran berpendapat bahwa masih lebih baik menetap di Jakarta daripada di desa asal. Anehnya, mereka merasa lebih beruntung perihal materi, sekalipun mutu kehidupan mereka lebih buruk daripada di desa. Bagi mereka yang berani mengambil resiko akan memilih tempat yang lebih menjanjikan, yaitu keluar negeri dengan pertimbangan kesempatan kerja yang lebih pasti dan upah yang lebih besar.

Jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri tahun 2004 mencapai 48.729 orang, dan hampir semuanya perempuan, yaitu 48.445 orang (Pikiran Rakyat, 18 Juni 2004). Pada umumnya, mereka menjadi TKW karena berharap dapat memperbaiki status ekonomi keluarga. Meningkatnya jumlah TKW ke luar negeri, sejak 1980-an makin dilegalkan oleh pemerintah dengan mengeluarkan sedikitnya 27 kebijakan (hingga 1994) yang mengatur tentang itu. Pemerintah Indonesia sepertinya tidak malu-malu lagi mengkomoditaskan warga negaranya. Fenomena Tenaga Kerja Wanita (TKW) tersebut dilihat dengan kacamata yang menganggap bahwa pengangguran merupakan representasi peristiwa kemanusiaan yang bisa ditembus dengan menyimak rasio pertumbuhan ekonomi yaitu fungsi investasi dan angkatan kerja. Kacamata demikian menganggap bahwa TKW merupakan pihak yang hanya ingin mendapatkan penghasilan lebih daripada yang bisa mereka peroleh di negeri sendiri tanpa melihat latar belakang dan resiko yang ditempuh oleh para TKW tersebut. Sering data TKW hanya diangkakan saja. Hanya dilihat berapa jumlah TKW yang bekerja di luar negeri, penghasilannya dan berapa devisa yang diterima negara.

Menyedihkan karena laporan mengenai besarnya penghasilan para TKW tidak pernah disertai dengan pengamatan berapa besar biaya yang telah mereka keluarkan. Dari mana modal tersebut diperoleh dan belum lagi besar resiko yang ditanggung apabila TKW tersebut mendapat masalah penipuan, perampasan, tindak kekerasan atau dihukum penjara seumur hidup, bahkan dihukum mati. Apabila dikaji lebih cermat, maka apa yang terjadi pada TKW ini merupakan manipulasi keadaan moral, sosial dan ekonomi di negara ini. Meningkatnya jumlah TKW harus dibaca

sebagai semakin meningkatnya angka kemiskinan dan semakin sempitnya kesempatan kerja.

Para TKW umumnya adalah perempuan yang tidak pernah pergi jauh dari rumah, tidak mengerti bahasa asing, bahkan hanya sedikit yang lancar bahasa Indonesia. Namun, semua ketakutan dan sesuatu yang tidak pernah dibayangkan harus mereka lalui, demi mempertahankan hidup. Keinginan memutus belenggu kemiskinan dengan jalan pintas menjadi TKW terpaksa mereka lakukan, tanpa memikirkan resiko yang akan mereka temui di negara tujuan. Kemiskinan menyebabkan masyarakat miskin informasi sehingga rentan dan mudah dieksploitasi. Dengan demikian dapat dimengerti bila TKW sering menjadi korban penipuan: mulai dari proses rekrutmen, penampungan, pemberangkatan, selama masa kerja di luar negeri, hingga pemulangan. Setiap tahapan selalu rentan dengan penipuan dan kekerasan.

Pemerintah sepertinya tidak peduli dengan semua kasus yang terjadi pada TKW, tidak terlihat upaya konkret untuk melindungi mereka dari berbagai kekerasan dan eksploitasi, sementara pemerintah tetap mengambil keuntungan melalui devisa yang mereka peroleh. Ini sungguh tidak fair. Pemerintah hendaknya melindungi warganya, termasuk para TKW itu. Perlindungan itu bisa diberikan dalam bentuk pemberian informasi yang menyeluruh dan transparan kepada semua warga sambil menjelaskan semua resiko yang bakal terjadi dalam pekerjaan mereka sebagai buruh migran. Melindungi mereka dari penipuan dan kekerasan para calo, agensi, dan majikan tempat bekerja. Harus ada pemihakan dan perlindungan yang kuat terhadap hak asasi TKW sebagai kelompok yang rentan. Bagaimana pun juga mereka adalah warga negara yang berhak mendapatkan perlindungan dari negara dan pemerintah. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana melepaskan perempuan dari lilitan kemiskinan.

D. Peran Agama dalam Pengentasan Kemiskinan dan Penegakan

Masalah mendasar dalam pembangunan bidang ekonomi adalah karena tuntutan pemenuhan kebutuhan yang tidak terbatas (konsumsi) dihadapkan kepada kelangkaan sumber daya yang sangat terbatas. Oleh sebab itu, produksi harus dilaksanakan

seefisien mungkin dan sesuai dengan kebutuhan manusia dari yang paling mendasar sampai kepada kebutuhan yang sekunder atau tersier. Ajaran agama mengakui adanya keterbatasan sumber daya yang berhadapan dengan keinginan manusia yang tidak terbatas. Ini misalnya dijelaskan dalam al-Quran: "Dan sungguh kami akan uji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira bagi orang-orang yang sabar." (Q.S al-Baqarah: 155). Sedangkan keinginan manusia tidak terbatas dan hal ini sangat indah dijelaskan dalam al-Qur`an: "Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke liang kubur. Janganlah kamu begitu, kelak kamu akan mengetahui (akibat perbuatanmu itu) (Q.S al-Takaatsur: 1-5)." Lalu diperkuat oleh sabda Nabi Muhammad: "bahwa manusia tidak akan pernah puas. Bila diberikan emas satu lembah, ia akan minta dua lembah, Bila diberikan dua lembah ia akan meminta tiga lembah dan seterusnya sampai ia masuk kubur".

Kemiskinan merupakan produk dari ketidakadilan dalam masyarakat. Dengan menggunakan perspektif ini, jelas bahwa kemiskinan bukanlah suatu keadaan yang diinginkan, termasuk oleh mereka yang berada dalam kemiskinan itu sendiri. Akan tetapi, harus diakui juga bahwa kemiskinan bukanlah suatu ketidaksengajaan. Melainkan suatu keadaan yang diakibatkan oleh sistem yang tidak adil. Kita lihat saja bagaimana nasib petani di bawah kekuasaan otoriter Orde Baru. Bagaimana, misalnya penguasa melakukan negaranisasi sumber-sumber agraria, sehingga dengan mudah menyerobot tanah rakyat dengan dalih pembangunan. Desa digenangi air untuk pembangunan waduk demi pembangunan. Ladang yang subur diubah menjadi lapangan golf, mall dan super market demi pembangunan.⁵

Ketidakadilan juga menyelimuti kaum miskin perkotaan. Mereka korban proses marjinalisasi di pedesaan, ketika tanah mereka diambil-alih oleh pemegang modal berskala besar dan pertanian diteknologisasi menjadi lebih efisien. Akibatnya, mereka migran ke kota dan mencoba bekerja di sektor informal menjadi pedagang kaki lima. Namun, di kota mereka tetap saja dimarjinalkan, dikejar-

⁵ Kusnadi, *Konflik Sosial Nelayan, Kemiskinan dan Perebutan Sumber Daya Alam*, (Yogyakarta: LKIS, 2002), h. 35.

kejar, dijarah dan ditertibkan aparat demi keindahan kota dan demi pembangunan nasional. Bukan saja negara yang menaruh benci pada mereka, masyarakat juga menaruh curiga setiap kali yang miskin mendekat. Sebaliknya masyarakat tidak pernah curiga bila orang berdasi yang datang. Padahal, boleh jadi mereka yang berdasi itulah yang merampok kekayaan negara dengan terang-terangan dan legal. Akan tetapi, yang bermasalah bukan saja kenyataan ketidakadilan tersebut, melainkan juga keabsahan dari ketidakadilan tersebut. Ketidakadilan dianggap sebagai hal yang normal sehingga banyak pandangan, termasuk pandangan agama, yang membenarkan kemiskinan atau melegitimasi kemiskinan.

Ketidakadilan sulit dilawan, sebab yang melawan ketidakadilan bisa dituduh subversif atau dituduh sedang menghidupkan ajaran komunis. Mereka yang melawan tindakan pemerintah yang penuh dengan ketidakadilan mudah dituding sebagai melawan hukum atau melawan pembangunan. Anehnya, kebanyakan kita tidak berlomba-lomba mengeritik penguasa yang lalai dan tidak adil, malah sebaliknya memberikan dukungan, maka hasilnya adalah suatu ketidakadilan yang mengakar dan tersistem (menjadi bagian dalam sistem).⁶

Mengapa kita harus melawan ketidakadilan demi mengentaskan kemiskinan? Tentu saja karena kondisi tersebut telah menjadi penghambat utama bagi proses aktualisasi manusia; kondisi tersebut telah menjadi penghambat utama bagi proses pembentukan peradaban yang manusiawi dan beradab. Ketidakadilan telah membenarkan berbagai bentuk tindakan yang menyimpang dari norma umum maupun norma agama. Situasi yang penuh ketidakadilan telah membangun suatu nilai baru, yakni untuk hidup manusia harus melakukan apa saja, termasuk melukai manusia lain. Maka tidak heran bila kita bisa menjumpai suatu praktek dimana satu manusia hidup dari ketakutan manusia yang lain; atau ada orang yang hidup dari kesulitan orang lain. Ambil contoh bagaimana kota berkembang dengan cara menyingkirkan orang-orang desa. Industri (orang-orang kota) telah membangun suatu tatanan, yang tidak memberi hormat pada pertanian (orang

⁶ Ahmad Khursid (ed), *Studies In Islamic Economic*, (Leicester: The Islamic Foundation, 1930), h. 99.

desa), dan pertanian (orang desa) hanya dijadikan alas kaki bagi kemajuan industri (orang kota).

Oleh karena itu, tatanan masyarakat yang berbasis ketidakadilan harus dihentikan. Selanjutnya bertransformasi menuju masyarakat baru yang berbasis keadilan. Bagaimana wujud dari masyarakat baru ini? Masyarakat baru tidak lain adalah masyarakat yang berbasis pada tiga fondasi utama: keadilan, demokrasi dan kemajuan. Keadilan menunjuk pada suatu kondisi dimana tidak terjadi dominasi, diskriminasi dan eksploitasi manusia atas manusia, serta adanya pemerataan dalam kemampuan pemenuhan kebutuhan hidup sebagai manusia. Konsep ini tidak saja berbicara mengenai suatu hubungan dalam struktur sosial, melainkan juga relasi gender, kelestarian lingkungan dan hubungan antargenerasi. Keadilan merupakan koreksi mendasar atas praktek eksploitasi dan marjinalisasi yang telah berlangsung lama.

Demokrasi adalah suatu kondisi dalam mana proses pengambilan kebijakan tidak dilakukan dengan cara paksa, militeristik, kekerasan dan segala bentuk tekanan yang mengabaikan dialog dan musyawarah. Dalam arti yang lebih umum demokrasi adalah sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Dalam demokrasi, rakyat yang memerintah, mengambil keputusan, dan merumuskan kebijakan-kebijakan. Adapun kemajuan mengacu pada suatu kondisi dimana ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat, dan menjadi salah satu kekuatan yang mengubah peradaban, agar bisa menjadi lebih manusiawi, bukan sebaliknya. Masa depan tidak lagi memuat kekumuhan, melainkan suasana baru yang memberi harga pada manusia.⁷ Cara mencapai kemajuan bukan dengan mengalienasi manusia atau menyingkirkan kelompok rentan, melainkan mentransformasikan atau membawa masyarakat kepada kehidupan baru yang lebih baik dan lebih bermakna.

Dalam kisah Para Rasul 4, 5- (Cara Hidup jemaat 4:32-35) disebutkan: '...sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka; karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah, menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka

⁷ Elza Peldi Tahir, *Demokrasi Budaya dan Ekonomi*, (Jakarta: Paramadina, 1994), h. 70.

bawa dan kemudian diletakkan didepan kaki rasul-rasul; lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya...”

Bahkan al-Qur`an secara tegas mengancam mereka yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya dan menegaskan bahwa harta tidak bisa dijadikan sandaran: ”...Kecelakaan bagi orang yang menumpuk harta dan menghitung-hitung. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya, sekali-kali tidak! Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam Huthamah. Dan tahukan kamu apa Huthamah itu? (yaitu) api yang disediakan Allah yang dinyalakan. Yang naik sampai ke hati. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka. (sedang mereka itu) diikat pada tiang-tiang yang panjang.”

Selanjutnya, menyatakan kemungkinan kemegahan adalah hukuman dari Tuhan! ”Bermegah-megahan telah melalaikan kamu, sampai masuk ke liang kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Janganlah begitu, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka Jahannam, dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ’ainul-yakin. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan (yang kamu megahkan di dunia itu) (Q.S: 102).

Ajaran Islam sangat jelas memosisikan manusia sebagai makhluk Tuhan. Dengan demikian, manusia tidak memiliki dasar untuk mengklaim sebagai ”pemilik”, kecuali sebagai makhluk semata. Malahan makna eksistensi manusia tidak diukur dari kepemilikan atas kekayaan dunia, melainkan atas keimanannya. Tentu saja agama membenarkan kepemilikan. Namun hal tersebut patut didasarkan pada prinsip: (1) bahwa harta bukan milik seseorang sepenuhnya, melainkan terdapat juga di dalamnya milik orang lain; dan (2) bahwa harta itu harus didistribusikan: ”supaya harta itu jangan sampai beredar hanya di antara orang-orang kaya di sekeliling kamu (Q.S: 59:7) Berarti Islam menentang berbagai bentuk akumulasi, dominasi dan konsentrasi. Bahkan, Al-Qur`an secara tegas menyebutkan bahwa musuh agama adalah mereka ”yang menelantarkan anak yatim” (Q.S. 107: 2-3). Dapat dikatakan bahwa musuh agama adalah mereka yang membiarkan kemiskinan berkembang dan tidak memperjuangkan hilangnya kemiskinan.

Islam pada dasarnya menekankan perlunya suatu moralitas baru yang tidak membenarkan proses akumulasi yang mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Moralitas yang tidak membenarkan proses akumulasi yang membenarkan penyingkiran atas yang miskin. Moralitas yang menekankan perlunya solidaritas pada yang kekurangan. Solidaritas harus dinyatakan secara jelas, paling tidak dalam doa: "...Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kegelisahan dan kesedihan, kelemahan dan kemalasan, dari sifat pengecut dan bakhil, dan tekanan hutang dan kesewenang-wenangan orang..."

Berangkat dari pemikiran di atas, maka dapat dikatakan di sini bahwa keadilan merupakan esensi dari ajaran semua agama, termasuk Islam. Ajaran keadilan dalam Islam bersumber dari ajaran tauhid. Tauhid mengajarkan hanya ada satu Tuhan yang patut disembah, selain Tuhan semuanya adalah makhluk. Tauhid membebaskan manusia dari pemahaman paganisme, membebaskan manusia dari ketidakadilan, dari penindasan kelas, dari ordonansi-ordonansi dan hukum-hukum yang dibebankan demi keuntungan satu kelompok, satu kelas tertentu. Ini merupakan misi Rasulullah saw., dan kita seharusnya meneruskan misi Rasul itu. Para syuhada juga meneruskan misi yang sama, melawan budaya-budaya yang dipaksakan, melawan sistem ekonomi yang dipaksakan, melawan hukum yang dipaksakan, melawan pelarangan-pelarangan yang kadang-kadang dipaksakan kepada masyarakat atas nama agama.

Seruan Islam adalah untuk rahmat dan pembebasan. Awal setiap surat dimulai dengan penyebutan dua jenis rahmat, yang umum dan yang khusus: "Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang" dan "Kami mengutusmu (Muhammad saw.) untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. (QS. 21:107). Rahmat ini adalah kasih bagi seluruh manusia. Bahkan, bagi pelaku dosa yang dihukum mati dalam hukum Islam masih juga berhak akan kasih sayang, bahkan dosa-dosanya mungkin dibersihkan dari kejahatannya, dan bahwa manusia berpotensi menjadi bebas dengan mengasihi orang lain. Jihad Nabi (perjuangan keagamaan) adalah rahmat, hijrahnya [perpindahan dari Mekkah ke Madinah] juga adalah rahmat, hukumnya adalah rahmat, bimbingan prinsip-prinsipnya adalah rahmat: karenanya ajaran Islam seharusnya didasarkan pada [prinsip] rahmat ini.

Jika demikian, agama harus tampil sebagai pemberi solusi atas pelbagai problem sosial kontemporer yang dihadapi manusia. Kalau keadilan diyakini sebagai esensi dari ajaran semua agama, seyogyanya semua penganut agama bergandeng tangan untuk mengeliminasi semua bentuk ketidakadilan di masyarakat, termasuk ketidakadilan ekonomi dalam wujud kemiskinan. Hanya dengan demikian kita bisa membangun masa depan peradaban manusia yang lebih humanis dan lebih akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan seperti terbaca dalam pesan-pesan moral agama. *Wallahu a`lam bi as-shawab.*

E. Pemberdayaan Perempuan dan Penegakan Keadilan

Kehidupan mengalir dari rahim perempuan. Kalau kita pelajari secara sekilas, mengapa sumber daya perempuan di Indonesia dan umumnya di seluruh dunia lebih tertinggal daripada sumberdaya laki-laki? Dengan mudah kita menemukan dua penyebab pokok yaitu: orientasi nilai-nilai sosial budaya yang tidak kondusif untuk pembangunan sumberdaya perempuan; dan masalah struktural sehingga peningkatan sumberdaya perempuan menjadi terpuruk, menjadi tidak mungkin mengimbangi peningkatan sumberdaya laki-laki. Nilai-nilai sosial budaya ikut merumuskan bagaimana pandangan dan harapan masyarakat terhadap perempuan, yakni memposisikan perempuan hanya sebagai objek, warga kelas dua, dan mendapat peran yang sangat terbatas.⁸

Pandangan budaya patriarki inilah yang antara lain menyebabkan perempuan dipinggirkan, didiskriminasikan, dan sangat berlebihan bebannya. Di desa, jam kerja perempuan panjang sekali. Sebelum matahari terbit sampai matahari terbenam, bahkan sampai mata suami terpejam, itulah jam kerja perempuan. Persepsi ini menggambarkan itulah tugas seorang perempuan. Hal ini menyebabkan upaya mengangkat harkat perempuan mengalami kesulitan. Dalam peraturan perundang-undangan seperti UU Perkawinan, UU Pekerjaan, UU Kesehatan, UU Kesejahteraan, perempuan terpinggirkan. Banyak peraturan perundang-undangan yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak seharusnya.

⁸ Zakiyuddin Baidawi, *Islam Melawan*, h. 231.

Kedua hal ini menyebabkan sumberdaya perempuan tertinggal dibandingkan laki-laki, baik di bidang pendidikan, kesehatan, akses terhadap ekonomi, dan bidang-bidang lain.

Terlihat jelas sekali bahwa perempuan yang berkualitas akan membangun kehidupan yang lebih bermanfaat dan lebih maju. Ada hubungan tingkat pendidikan perempuan atau istri terhadap jumlah anak. Semakin tinggi tingkat pendidikan istri, biasanya jumlah anak semakin berkurang. Istri yang berpendidikan tinggi lebih mampu merencanakan masa depan yang lebih baik dan lebih mampu menyesuaikan keinginan-keinginan yang akan dicapai. Sekarang hampir semua masyarakat internasional menganggap *investing on woman is good economic*.

Namundemikian, perempuan sebagai pelaku ekonomi mikro, masih terpinggirkan dalam proses pembangunan ekonomi makro. Keterbatasan akses terhadap sumberdaya ekonomi, informasi, dan teknologi telah menghalangi berkembangnya potensi perempuan sebagai pelaku ekonomi. Oleh karena itu, program-program sosial-ekonomi yang diperuntukkan bagi perempuan, masih merupakan pintu masuk pemberdayaan perempuan yang cukup strategis.

Pemberdayaan (*empowering*) perempuan adalah upaya sistematis untuk memastikan pencapaian kesejahteraan perempuan, suatu kesejahteraan yang tidak hanya diukur berdasarkan tingkat kemakmuran material tetapi lebih difokuskan pada upaya memampukan kelompok-kelompok perempuan, terutama kelompok di jenjang akar rumput (*grass root level*). Pemberdayaan di sini lebih dititikberatkan pada cara kelompok perempuan mendayagunakan semua potensi yang dimilikinya, cara memelihara habitat sosial, budaya, dan lingkungan, serta cara memahami dan membela hak-haknya sendiri.

Pengalaman di dalam pemberdayaan kelompok perempuan terutama kelompok akar rumput menunjukkan bahwa terdapat sedikitnya dua karakteristik yang berkaitan dengan watak dan interaksi kelompok perempuan. Pertama, kelompok perempuan akar rumput memiliki ciri egaliter yang dimanifestasikan ke dalam sikap kental untuk saling membantu, baik antaranggota maupun antaranggota keluarga di dalam kelompok. Itupula sebabnya, di dalam banyak hal, beban jender terdistribusi sedemikian rupa

berdasarkan kemauan anggota kelompok untuk tetap survive. Kedua, kelompok akar rumput lebih memiliki kemauan menyebarkan pengetahuan untuk kepentingan kelompok. Pengetahuan individu kelompok lebih mudah digeser menjadi pengetahuan komunal.⁹ Oleh karena itu, pengelolaan sumberdaya alam secara bersama, ataupun cara membela hak secara bersama-sama adalah refleksi dari perasaan komunal.

Di jenjang masyarakat akar rumput, tidak ada persaingan untuk memperebutkan sesuatu. Sumber-sumber ekonomi dibagi bersama, posisi dan peran yang dimainkan oleh anggota tidak dalam kerangka perebutan simbol sebagaimana yang terjadi di kelas menengah dan kelas atas. Kenyataan, modal yang mereka miliki juga dipelihara secara bersama. Sebab, kesejahteraan yang dibangun di jenjang akar rumput merupakan kesejahteraan yang bertanggung jawab dan bersifat antargenerasi.

F. Penutup

Kemiskinan, perempuan dan agama merupakan problematika kehidupan kontemporer yang selalu menjadi perbincangan di kalangan ilmuwan-ilmuwan baik psikolog, sosiolog, budayawan, antropolog dan sebagainya. Tiga unsur ini cukup mendominasi dalam mengarungi kehidupan kenegaraan dan kebangsaan. Hubungan dialektis antara ketiganya telah melahirkan hubungan yang memilukan. Kalau kita menghubungkan antara kemiskinan dan agama, maka yang menjadi obyek adalah perempuan. Dan, di antara kemiskinan dan perempuan sangat jelas bahwa korban yang paling menderita adalah perempuan. Sementara pertemuan antara perempuan dan agama selalu menimbulkan kegetiran karena agama memandang perempuan sebagai makhluk setengah laki-laki.

Faktor yang ikut menyumbang terjadinya kemiskinan adalah kurang tegaknya keadilan. Sehingga upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan dengan membangun masyarakat yang berbasis keadilan. Dalam konteks ini, agama memiliki peran penting, karena agama, mengandung ajaran tentang keadilan. []

⁹ Muh. Syafi'i Antonio, , *Membangun Ekonomi Islam di Indonesia Sebagai Post Capitalist Ekonomix*, Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun ke XXI, 2006, h. 179.

Daftar Pustaka

- al-Kaaf, Abdullah Zaki, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid III*, Jakarta: Dana Bakti Primayasa, 1999.
- Khursid, Ahmad, (ed), *Studies In Islamic Economic*, Leicester: The Islamic Foundation, 1930.
- Antonio, Muh. Syafi'i, *Membangun Ekonomi Islam di Indonesia Sebagai Post Capitalist Ekonomix*, Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun ke XXI, 2006.
- Tahir, Elza Peldi, *Demokrasi Budaya dan Ekonomi*, Jakarta: Paramadina, 1994.
- Nasution, Harun, *Theologi Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
- Kusnadi, *Konflik Sosial Nelayan, Kemiskinan dan Perebutan Sumber Daya Alam*, Yogyakarta: LKIS, 2002.
- Al-Amin, Muh. al-Basyar Muh., *Istisna (Manufacturing Contract) in Islamic Banking And Finance Law and Practice*, Kuala Lumpur: A.S. Noordeen, 2000.
- Al-Shadr, Muh. Baqir, *Iqtishaduna*, Jakarta: Zahra, tt.
- Khalid, Muhammad, *Agama dan Wanita*, Jakarta: Bulan Bintang, 2000.
- Baidawi, Zakiyuddin, *Islam Melawan Kapitalisme*, Yogyakarta: Resist Book, 2007.